

## Optimalisasi Konsep Reinventing Government pada Pemerintah Desa di masa Pandemi Covid-19

Saekul Anwar<sup>a</sup>, Rofi' Ramadhona Iyoega<sup>b</sup>

<sup>ab</sup> Politeknik STIA LAN Bandung

e-mail : a saekul.anwar@poltek.stialanbandung.ac.id, b rofi.iyoega@poltek.stialanbandung.ac.id

### Abstrak

Artikel ini memaparkan tentang Optimalisasi Konsep Reinventing Government pada Pemerintah Desa di masa Pandemi Covid-19. Good governance merupakan suatu keharusan yang sudah tidak bisa ditawar lagi, oleh karena itu political will dari berbagai pihak terutama pemerintah untuk mewujudkan konsep tersebut perlu dorongan dan dukungan dari seluruh elemen bangsa. Pandemi covid-19 pada tahun 2020 memaksa pemerintah untuk melakukan penyesuaian besar-besaran terhadap tata Kelola pemerintahan, tidak hanya di pusat, namun juga didesa. Reinventing government merupakan kosep yang sudah lama kita kenal dan dimasa pandemic ini tidak salahnya kita menconca mengoptimalkan konsep ini dalam efektifitas penyelenggraan pemerintahan di desa.

**Kata Kunci:** Optimalisasi;Reinventing Government; Pemerintah Desa: Covid 19

### *Optimizing the Concept of Reinventing Government in Village Governments during the Covid-19 Pandemic*

#### *Abstract*

*This article describes the Optimization of the Concept of Reinventing Government to Village Governments during the Covid-19 Pandemic. Good governance is a necessity that cannot be negotiated, therefore the political will of various parties, especially the government, to realize this concept needs encouragement and support from all elements of the nation. The Covid-19 pandemic in 2020 forces the government to make major adjustments to governance, not only at the center, but also in villages. Reinventing government is a concept that we have known for a long time and in this pandemic, it is not wrong for us to try to optimize this concept in the effectiveness of government administration in the village.*

**Keywords:** *Optimizing ; Reinventing Government ; Village Government: Covid-19*

#### A. PENDAHULUAN

Tahun 2020, merupakan tahun yang sarat akan tantangan di berbagai belahan dunia. Covid-19 merupakan penyebab akan hal ini dan banyak menyedot perhatian masyarakat di berbagai belahan dunia. Sejak pertama kali virus ini terdeteksi di Wuhan, Provinsi Hubei, Cina pada 8 Desember 2019, virus ini telah menyebar ke hampir 216 negara di seluruh dunia (WHO, 13 Juni 2020). Pandemi Covid-19 ini tidak hanya mengancam kesehatan manusia, namun juga telah memengaruhi kemerosotan ekonomi dunia (Shangguan, Wang, & Sun, 2020).

Indonesia termasuk negara di Asia yang kena dampak COVID cukup parah. Hingga 04 November 2020, diketahui bahwa jumlah kasus Covid 19 Positif 425.796 Sembuh 357.142

Meninggal 14.348 (satgas penanganan Covid-19). Pandemi ini secara tidak langsung telah mengubah berbagai tatanan kehidupan manusia di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Pandemi virus corona menuntut pemerintah untuk berinovasi dan merubah semua kebiasaan yang telah dilakukan hingga saat ini.

Pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai macam kebijakan, termasuk diantaranya adalah adalah kebijakan untuk bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah, atau dikenal dengan istilah Work From Home. Penerapan social, physical distancing, dan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) juga diterapkan dengan tujuan agar rantai penularan Covid-19 dapat terhambat di Indonesia, Taufik, T., & Warsono, H. (2020).

Kebijakan ini sekarang menjadi sebuah kebiasaan baru atau yang dikenal dengan istilah *new normal*. Kebijakan ini secara tidak langsung berpengaruh dalam tata laksana penyelenggaraan pemerintahan di berbagai tingkatan, termasuk tingkatan desa.

Saat ini, desa-desa sedang menghadapi tantangan untuk memenuhi tuntutan sosial akibat COVID-19. Tantangan ini salah satunya dalam bentuk penggunaan dana desa sebagai dukungan pendapatan, informasi kesehatan, bantuan penargetan masyarakat untuk mengidentifikasi "orang miskin baru" dan rentan, serta pemantauan daerah terpencil. Program baru mengenai transfer dana tunai tanpa syarat ini menggunakan mekanisme penargetan berbasis masyarakat, (world Bank, 2020). Pemerintah desa merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat di Indonesia, terutama disaat pandemi.

Dalam keadaan seperti ini, *reinventing government* di pemerintahan desa bisa menjadi salah satu opsi yang bisa diterapkan untuk optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan di ranah desa. Seperti diketahui bahwa Perkembangan sistem pemerintahan dari masa ke masa memiliki permasalahannya sendiri, di mana masing-masing permasalahan selalu jatuh pada 'Perilaku Birokrasi yang cenderung tidak efisien'.

*Reinventing Government* merupakan suatu usaha sadar dan terencana untuk mengubah struktur dan prosedur birokrasi (aspek reorganisasi atau institusional) dan sikap perilaku birokrat (aspek perilaku) guna meningkatkan efektivitas organisasi. *Reinventing government* merupakan suatu konsep dimana pemerintahan dapat diwirausahakan sehingga dapat memenuhi kebutuhan birokrasi. Tujuan *reinventing government* adalah untuk dapat menumbuhkan sikap dan perilaku birokrat yang inovatif, adaptif terkontrol oleh birokrasi sehingga bermartabat dan berorientasi pada masyarakat. Konsep *reinventing government* ini dikemukakan oleh David Obsorn dan Gaebler diawal tahun 90-an. Makalah ini mencoba untuk melihat Kembali Optimalisasi

Konsep *Reinventing Government* pada Pemerintah Desa di masa Pandemi Covid-19.

## B. PEMBAHASAN

Pandemi COVID-19 adalah krisis sosial dan ekonomi global terbesar dalam beberapa generasi terakhir. Selama krisis, pemerintah pusat dan daerah menghadapi tuntutan yang sangat besar. Di saat seperti ini, mereka membutuhkan sistem atau konsep pemerintahan yang sudah teruji dan menempatkan warga sebagai pusat perancangan terhadap solusi mereka sendiri, memberikan cara cepat dan fleksibel dalam penyediaan layanan dasar kepada masyarakat paling miskin dan rentan.

Sejumlah organisasi, termasuk Centers for Disease Control and Prevention (CDC) dan World Health Organization, mengakui peran penting masyarakat dalam merespons pandemi. Pelajaran dari pandemi sebelumnya, termasuk wabah Ebola 2014-2016, menyoroti pentingnya respons sosial terhadap manajemen dan pemulihan krisis untuk melengkapi upaya medis. Dalam kasus COVID-19, tata Kelola pemerintahan desa memiliki peran penting dalam memperlambat penyebaran, memitigasi dampak, dan mendukung pemulihan warga setempat.

*Reinventing government* merupakan cara birokrasi mengubah sistem atau pengaturan agar pelaksanaan pemerintahan dapat berjalan secara akuntabilitas, responsif, inovatif, profesional, dan entrepreneur. Entrepreneur dimaksudkan agar pemerintah daerah yang telah diberikan otonomi memiliki semangat kewirausahaan untuk lebih inovatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan dapat menjawab tuntutan masyarakat di era globalisasi. Sehingga mewirausahakan birokrasi bukan berarti birokrasi melakukan wirausaha untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya melainkan memberdayakan institusi agar produktivitas dan efisiensi kerja dapat dioptimalkan. Konsep *reinventing government* harus dikuasai oleh aparat birokrasi pemerintah daerah, pimpinan instansi/ dinas di daerah dan terutama Bupati/ Walikota. Osborne dan Gaebler (1992) dalam buku mereka yang berjudul *Reinventing Government: How the entrepreneurial spirit is*

*transforming the public sector* mengemukakan sepuluh cara untuk membentuk birokrasi-wirausaha, yaitu:

- 1) *Catalytic government: Steering rather than rowing.*  
Aparatur dan birokrasi menjadi katalisator dengan mengendalikan sumber-sumber yang ada di masyarakat. Dengan demikian aparatur dan birokrasi dapat mengoptimalkan penggunaan dana dan daya sesuai dengan kepentingan publik.
- 2) *Community-owned government: empower communities to solve their own problems, rather than merely deliver services.*  
Aparatur dan birokrasi harus memberdayakan masyarakat dalam pemberian pelayanannya. Organisasi-organisasi kemasyarakatan seperti koperasi, LSM dan sebagainya, perlu diajak untuk memecahkan permasalahannya sendiri, seperti masalah keamanan, kebersihan, kebutuhan sekolah, pemukiman murah dan masalah lain terkait Covid-19.
- 3) *Competitive government: promote and encourage Competition, rather than monopolies.*  
Aparatur dan birokrasi mampu menciptakan persaingan dalam setiap pelayanan. Dengan adanya persaingan maka sektor usaha swasta dan pemerintah bersaing dan bekerja lebih profesional dan efisien.
- 4) *Mission-driven government: be driven by mission, rather than rules".*  
Aparatur dan birokrasi harus melakukan aktivitas yang menekankan kepada pencapaian apa yang merupakan "misinya" dari pada menekankan pada peraturan-peraturan. Setiap organisasi diberi kelonggaran untuk menghasilkan sesuatu sesuai dengan misinya.
- 5) *Result-oriented government: result oriented by funding outcomes rather than inputs.*  
Aparatur dan birokrasi hendaknya berorientasi kepada kinerja yang baik. Dengan mengutamakan kepentingan masyarakat sebagai landasan utamanya
- 6) *Customer-driver government: meet the needs of the customer rather than the bureaucracy.*

Aparatur dan birokrasi harus mengutamakan pemenuhan kebutuhan masyarakat bukan kebutuhan dirinya sendiri. Kebutuhan masyarakat disini menyangkut kebutuhan yang sifatnya material maupun spiritual. Masyarakat harus merasa keberadaan pemerintah menjadi sebuah kebaikan dan bukan sebaliknya.

- 7) *Enterprising government: concentrate on earning money rather than just speeding it.*  
Aparatur birokrasi harus memiliki aparat yang tahu cara yang tepat dengan menghasilkan uang untuk organisasinya, disamping pandai menghemat biaya. Dengan demikian para pegawai akan terbiasa hidup hemat. Konsep ini mungkin kurang tepat untuk diadopsi di Indonesia dimasa pandemi ini. Karena focus kita sekarang adalah bagaimana kita bisa bertahan dimasa yang sulit seperti saat ini.
- 8) *Anticipatory government: invest in preventing problems rather than curing crises.*  
Aparatur dan birokrasi yang antisipatif. Lebih baik mencegah daripada menanggulangi. Lebih baik mencegah terjadinya kebakaran daripada memadamkan kebakaran. Lebih baik mencegah epidemi daripada mengobati penyakit. Dengan demikian akan terjadi 'mental swich' dalam aparat daerah. Walaupun terkesan terlambat untukantisipasi dampak pandemic ini, paling tidak pemerintah sudah berusaha untuk meminimalisir dampak yang jauh lebih buruk yang akan kita hadapi terkait pandemic ini.
- 9) *Decentralized government: decentralized authority rather than build hierarchy.*  
Diperlukan desentralisasi dalam pengelolaan pemerintahan, dari berorientasi hirarki menjadi partisipatif dengan pengembangan kerjasama tim. Dengan demikian organisasi bawahan, seperti organisasi desa akan lebih leluasa untuk berkreasi dan mengambil inisiatif yang diperlukan.
- 10) *Market-oriented government: solve problems by influencing market forces rather than by treating public programs.*

Aparatur dan birokrasi harus memperhatikan kekuatan pasar. Pasokan didasarkan pada kebutuhan atau permintaan pasar dan bukan sebaliknya. Untuk itu kebijakan harus berdasarkan pada kebutuhan pasar.

Dari kesepuluh prinsip tersebut sebenarnya ada beberapa konsep yang sangat mungkin untuk diadopsi dan dikembangkan di Indonesia, terutama oleh pemerintah desa di masa pandemic seperti saat ini. Konsep tersebut adalah: *Catalytic* dan *Anticipatory Government*.

Pada masa pandemic seperti sekarang ini pemerintah harus menjadi katalisator perubahan. Hal ini berarti bahwa pemerintah menempatkan birokrasi lebih sebagai pengatur dan pengendali daripada sebagai pelaksana langsung suatu urusan dan pemberi layanan (*steering rather than rowing*). Secara implisit hal ini mengandung makna bahwa pemerintah desa harus lebih banyak memberikan peran dan tanggungjawabnya kepada elemen-elemen yang ada di masyarakat atau Lembaga-lembaga yang ada di wilayahnya dalam menyelenggarakan urusannya baik melalui privatisasi, lisensi, konsesi, kerjasama operasional dan sebagainya. Dalam hal ini, semua pihak diajak untuk memikul peran dan tanggungjawab, yang selama ini terkesan hanya ditanggung oleh pemerintah atau hanya tergantung pada pemerintah.

Disamping itu, jika urusan-urusan yang sebenarnya bisa diserahkan kepada organisasi swadaya masyarakat tetap dipegang / dilaksanakan oleh pemerintah, dikhawatirkan menimbulkan gejala "ketergantungan" masyarakat kepada pemerintah, dimana setiap permasalahan yang muncul, penyelesaiannya selalu dipasrahkan sepenuhnya kepada pemerintah, sehingga kreativitas dan semangat inovasi individu menjadi melemah. Disinilah konsep *catalytic* menjadi penting. Karena jika konsep ini berhasil diwujudkan, ketergantungan masyarakat pada pemerintah akan sedikit berkurang.

Berbagai hal penting dalam Pengkatalisasian ini adalah pentingnya menerjemahkan kembali pemaknaan dari kepengintahan, kemudian melakukan restrukturisasi dimana kondisinya akan

semakin kuat meski nyatanya semakin ramping, selanjutnya dilakukan pemisahan antara *steering* dan *rowing* pada berbagai bidang pelayanan yang relevan, serta menciptakan *image* bahwa pekerja pemerintah atau pegawai negeri bukanlah menjadi korban dari sistem yang ada melainkan sebagai pihak yang diuntungkan.

Selain menjadi katalisator perubahan, poin yang tidak kalah penting dan mungkin bisa diadopsi dan dioptimalkan oleh pemerintahan di Indonesia adalah *anticipatory government*. Istilah ini dalam bahasa Indonesia yaitu Pemerintahan yang Antisipatif: Mencegah lebih baik dari pada menanggulangi. Maksudnya adalah hendaknya pemerintah merubah fokus pelayanan yang sebelumnya bersifat mengobati kerusakan menjadi bersifat pencegahan terhadap kerusakan, terutama pada bidang pelayanan kesehatan, lingkungan dan polusi, serta pencegahan terhadap kebakaran melalui pembentukan *future commission* dengan melandaskan kegiatannya pada perencanaan strategik.

Dalam kaitannya dengan pandemi Covid-19, walaupun dirasa terkesan terlambat, pemerintah desa masih dapat menantisipasi dampak terburuk akibat pandemic yang tak kunjung usai. Dalam hal ini pemerintah bisa melakukan inovasi-inovasi pelayanan yang dahulunya berbasis luring menjadi daring. Selain itu pemerintah desa juga bisa terus mengedukasi masyarakat agar senantiasa sadar dan mempunyai inisiatif yang baik untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penularan Covid-19 ini.

Dalam antisipasi penanggulangan Covid 19 ini pemerintah desa melakukan berbagai cara diantaranya adalah penyesuaian dana desa untuk dialokasikan lebih kearah penanganan Covid-19. Beberapa pemerintah dan masyarakat desa juga saling bahu membahu dalam mengatasi krisis ini. Adanya bantuan-bantuan yang dikeluarkan dari alokasi dana desa, penyediaan tempat karantina mandiri dan pengoptimalan bumdes merupakan salah satu bentuk antisipasi desa agar tetap bertahan dimasa pandemic seperti saat ini.

Antisipasi ini sebenarnya sudah dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah, hanya saja untuk pengoptimalannya peran pemerintah

desa sangatlah penting karena mereka merupakan salah satu yang sangat menentukan keberhasilan pemerintah kita secara umum dalam menghadapi krisis pandemic yang berkepanjangan ini.

### C. KESIMPULAN

Konsep *reinventing government* adalah usaha mewirauahakan pemerintah untuk menjadi kreatif dan inovatif dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat agar dapat lebih produktif dan menciptakan organisasi pemerintahan yang mandiri sesuai dengan azas desentralisasi dan otonomi. Tujuan penerapan *reinventing government* dimasa pandemic seperti saat ini adalah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan memberdayakan aparaturnya. Dari kesepuluh konsep yang ditawarkan oleh Osborne, paling tidak ada 2 konsep yang sangat mungkin bisa dioptimalkan pemerintah desa mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintah desa dimasa pandemic Covid-19 ini. Diantara konsep tersebut adalah *catalytic* dan *anticipatory government*.

### D. REKOMENDASI

Kajian penelitian lebih lanjut tentang inovasi strategi pencapaian poin *reinventing government* dimasa pandemic covid ini perlu dilakukan, terutama dalam tata pemerintahan yang memiliki tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan dengan pemerintah desa.

### REFERENSI

Djumiarti, Titik, Mengagas Strategi *Reinventing Government* Dalam Memantapkan Kehidupan Berbangsa, [http://eprints.undip.ac.id/19403/2/Artikel\\_Forum\\_Nasionalisme\\_baru\\_sekali.pdf](http://eprints.undip.ac.id/19403/2/Artikel_Forum_Nasionalisme_baru_sekali.pdf).

Gaebler, T., and Plastrik, P. (1997). *Banishing Bureaucracy: The Five strategies For Reinventing Government*. Massachusetts: Addison Wesley.

[https://www.who.int/docs/default-source/searo/indonesia/covid19/who-2019-ncov-comm-health-care-2020-1-eng-indonesian-final.pdf?sfvrsn=42bf97f9\\_2](https://www.who.int/docs/default-source/searo/indonesia/covid19/who-2019-ncov-comm-health-care-2020-1-eng-indonesian-final.pdf?sfvrsn=42bf97f9_2)

Magang. (2015, April 16). *Reinventing government (Mewirauahakan Birokrasi) "How the entrepreneurial Spirirt is transforming the public sector"*. Badan Kepegawaian Daerah D.I. Yogyakarta. <https://bkd.jogiaprov.go.id/informasi-publik/artikel/reinventing-government-mewirauahakan-birokrasi-how-the-entrepreneurial-spirirt-is-transforming-the-public-sector>

Osborne, D. (1993). *Reinventing government. Public productivity & management Review*, 349-356.

Respons Berbasis Masyarakat terhadap COVID-19: Ketahanan Indonesia. (2020, June 1). World Bank. <https://www.worldbank.org/in/news/feature/2020/06/01/community-led-responses-to-covid-19-the-resilience-of-indonesia>

Rohmadin, S., & Wasistiono, S. (2020). MOMENTUM PENATAAN ULANG ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA PADA ERA "NEW NORMAL". *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 46(1), 213-229.

Shangguan, Z., Wang, M. Y., & Sun, W. 2020. What Caused the Outbreak of COVID-19 in China: From the Perspective of Crisis Management. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17, 1-16. <https://doi.org/10.3390/ijerph17093279>

Taufik, T., & Warsono, H. (2020). Birokrasi Baru Untuk New Normal: Tinjauan Model Perubahan Birokrasi Dalam Pelayanan Publik Di Era Covid-19. *Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(1), 1-18.